



# RENCANA KERJA

## TAHUN 2024



# BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

JL. MAWAR NO. 8 LUBUK PAKAM  
TEL. (061) 7952370 FAX : (061) 7956076 Email [bpkad@deliserdangkab.go.id](mailto:bpkad@deliserdangkab.go.id)

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	28
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>29</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	30
3.3. Program dan Kegiatan.....	32
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	10
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022.....	18
Tabel 3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang .....	25
Tabel 4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.....	28
Tabel 5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	33
Tabel 6	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Untuk menunjang Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Daerah yang berdaya guna dan berhasil maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu fungsi penunjang pemerintahan perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan program dan kegiatan untuk periode satu tahun ke depan dalam rangka

mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyalarsan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPJMD tahun bersangkutan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli

Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;

14. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Menyelaraskan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahun 2024;
2. Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja ini antara lain:

1. Menjabarkan Renstra BPKA tahun 2019-2024 kedalam program dan kegiatan untuk satu tahun;
2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024;
3. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BKAD Kabupaten Deli Serdang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan untuk mengetahui realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, mengetahui realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, dan mengetahui realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrument penilaian.

Evaluasi ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yaitu tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan yaitu tahun 2023, mengacu pada APBD tahun 2023 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d Tahun 2023	
1									2				3	
5	02	01	2.01	04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%

5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					-		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1320 Orang	60 Orang	720 OB	612 OB	85%	60 OB		100%
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		240 OB	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	3 Dokumen		
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		54 OPD	55 OPD	55 OPD	100%	1 Dokumen		
5	02	01	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-					-		
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	584 Paket	102 Paket	120 Paket	50 Paket	42%	60 Paket	282 Paket	50%
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 Orang		120 Orang	0	0	120 Orang	120 Orang	20%
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					-		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	60%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	8 Paket	19 Paket	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	159 Paket	31 Paket	34 Paket	34 Paket	100%	36 Paket	112 Paket	70%

5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	4 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	29 Paket	80%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		10 org	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	34 Dokumen	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		102 HOK	36 Laporan	36 Laporan	100%	12 Laporan		
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2000 Dokumen	-	-	-	3000 Dokumen	500 Dokumen	
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	-	-	12 Dokumen		
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-					-		
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	5 Unit	7 Unit	1 Unit	15%	6 Unit	13 Unit	50%
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	6 Unit	10 Unit	7 Unit	70%	8 Unit	27 Unit	80%
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		18 lbr	12 Laporan	12 Laporan	100%	24 Laporan		

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Jenis	2 Laporan	2 Laporan	100%	24 Laporan		
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		181 OB	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-		100%
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 Unit	623 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	659 Unit	>100%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Jenis	2 Jenis	8 Jenis	4Jenis	50%	8 Jenis	18 Jenis	50%
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 m2	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit		
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	65 Unit	69 Unit	80%
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-							
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-					-		
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	390 Dokumen	78 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	100%	54 Dokumen	187 Dokumen	50%
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	390 Dokumen	78 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	100%	54 Dokumen	187 Dokumen	50%

5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	390 Dokumen	78 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	100%	54 Dokumen	187 Dokumen	50%
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	390 Dokumen	78 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	100%	54 Dokumen	187 Dokumen	50%
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	7 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	30%
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			-	-	-	70 Dokumen		
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-					-		100%
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			-	-	-	12 Dokumen		
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			-	-	-	648 Dokumen		

5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			-	-	-	12 Dokumen		
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			-	-	-	12 Dokumen		
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			-	-	-	12 Laporan		
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-					-		



5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	25 Laporan	31 Laporan	>100%
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	80%
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					-		
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	380 Desa	380 Desa	380 Laporan	380 Laporan	100%	380 Desa		
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	56%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%		
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	380 Desa		380 Laporan	380 Laporan	100%	380 Desa		
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-							
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-					-		

5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	72 Laporan	122 Sertifikat	100 Laporan	82 Laporan	92%	200 Persil	322 Laporan	>100%
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			-	-	-	1 Laporan		
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Laporan	6 Laporan	60%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 2 sasaran dan 3 indikator yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan Berita Acara Hasil Reviu Renstra, juga telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan (PK Perubahan) Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2  
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah  
Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target Renstra					Realisasi Capaian Thn 2022	Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024		Thn 2023	Thn 2024	
1	Persentase penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	70	72	74	76	78	79	79	Tercapai	
3	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70	72	74	76	78	89,70	78	78	Tercapai

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Sementara yang menjadi fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati diatas adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pembinaan teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang juga diberikan wewenang oleh Bupati Deli Serdang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang.

Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang diberi tugas – tugas sebagai berikut;

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
4. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Dalam wewenang fungsinya selaku BUD, PPKD berwenang untuk:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA/DPPA perangkat daerah;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
7. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
8. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
9. menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD, namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain tentang tata kelola pemerintahan.

Tata kelola pemerintah dalam pembangunan daerah juga memiliki peranan yang penting. Tanpa ada tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan untuk kehidupan masyarakat daerah akan sulit untuk dilaksanakan. Mewujudkan hal itu, pemerintah perlu menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas, transparansi, dapat diprediksi, efektif dan efisien.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategi, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat isu-isu penting termasuk hal-hal yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi BKAD telah berupaya mengambil langkah-langkah solusi sebagai berikut;

1. Penyusunan APBD membutuhkan ketepatan waktu dan keakuratan data baik dalam penganggaran dan realisasinya. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sistem aplikasi yang memadai dan jaringan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan secara online. Mulai tahun 2021 penyusunan anggaran dilakukan dengan menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai yang telah diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Namun dalam hal penatausahaan dan pelaporan di SIPD belum sempurna maka BKAD selaku Sekretariat TAPD mengambil langkah kembali memakai Simda dari BPKP yang sudah digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk kelancaran dalam penggunaan aplikasi Simda maupun SIPD, BKAD melakukan pemeliharaan dan upgrade secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelaporan keuangan dan aset. BKAD juga terus meningkatkan jaringan internet yang memadai sehingga

perangkat daerah tidak mengalami kendala dalam hal penginputan anggaran.

2. Penyusunan laporan keuangan juga sangat diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu sebelum 31 Maret setiap tahunnya. Untuk itu BKAD dalam hal ini bidang Akuntansi selaku bidang yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan hasil kompilasi dari laporan keuangan perangkat daerah selalu melakukan pendampingan dan rekonsiliasi data kepada perangkat daerah untuk mempermudah dan mempercepat tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah juga selalu berkoordinasi kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baik dalam hal penatausahaan maupun pelaporan agar senantiasa berada pada jalurnya dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Penyusunan laporan keuangan yang baik tidak terlepas dari tertibnya data aset atau inventarisasi aset tiap perangkat daerah. Masalah yang sering dihadapi adalah kompetensi para pengurus barang di perangkat daerah. Diharapkan semua pengurus barang harus memahami pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bidang aset melakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan pelaporan barang milik daerah guna menjaga kelancaran dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan daerah antara lain;
  - Melakukan pendampingan dan pelatihan inventarisasi aset yang meliputi pencatatan, pelaporan, penghapusan dan pertanggungjawabannya yang diikuti seluruh pengurus barang tiap perangkat daerah.
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke semua perangkat di kabupaten deli serdang dalam rangka konsolidasi data aset

yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) perangkat daerah dengan Simda Barang Milik Daerah.

- Melakukan cek fisik dan cek lapangan atas data aset yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) perangkat daerah.
4. Pengurusan sertifikat tanah milik Pemkab juga terus dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang tiap tahun ditargetkan dapat menyelesaikan 100 sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN.
  5. Dalam hal memudahkan proses pencairan SP2D, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama PT. Bank Sumut akan melakukan kerjasama CMS (Cas Management System) dan telah melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis implementasi CMS Kasda dan CMS OPD non SP2D.
  6. Adanya tuntutan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dengan berlakunya regulasi tentang keterbukaan informasi tersebut mengharuskan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempublikasikan keuangan dan aset yang dikelolanya kepada masyarakat sebatas informasi/data-data yang tidak termasuk dalam pengecualian. Badan Keuangan dan Aset Daerah dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyajikan data-data pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun langkah-langkah yang telah diupayakan dalam melaksanakan amanat tersebut adalah :
    - mempublikasikan Ringkasan APBD dan Laporan Keuangan kedalam website Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu pada [www.bpka.deliserdangkab.go.id](http://www.bpka.deliserdangkab.go.id) ;
    - menyusun buku Laporan Keuangan Daerah, APBD dan Perubahan APBD serta lampiran-lampirannya untuk didistribusikan kepada perangkat daerah yang membutuhkannya, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya;



- Secara berkala mengupload agenda dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah kedalam website;
- Mempublikasikan ke mass media setiap kegiatan lelang barang yang akan dilakukan oleh Pemkab Deli Serdang.

## **2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dokumen rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan indikator kinerja, besaran target/tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah serta identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan didanai.

Penyusunan Rancangan Awal Renja dari Rancangan Awal RKPD berjalan secara paralel dalam kurun waktu yang bersamaan, sehingga ketika ranwal RKPA telah ditetapkan maka seluruh Perangkat Daerah perlu melakukan perbandingan-perbandingan antara ranwal renja yang telah disusun dengan Rancangan Awal RKPD yang telah ditetapkan, guna menghindari inkonsistensi perencanaan antara Pemerintah Daerah dan perangkatnya, dan Rencana Kerja BKAD sudah sinkron tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Informasi review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten deli serdang	-	115.575.852.883,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten deli serdang	-	115.575.852.883,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	78.697.490,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	78.697.490,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	9.624.521.138,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	9.624.521.138,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	95.668.506,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	95.668.506,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi umum perangkat daerah	100%	2.392.535.295,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi umum perangkat daerah	100%	2.392.535.295,00	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	426.688.554,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	426.688.554,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	101.711.890.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	101.711.890.100,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.245.851.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.245.851.800,00	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		Terlaksananya program pengelolaan keuangan daerah	-	600.207.042.712,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Terlaksananya program pengelolaan keuangan daerah	-	600.207.042.712,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	2.157.666.524,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	2.157.666.524,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1.206.699.884,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1.206.699.884,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1.568.086.021,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1.568.086.021,00	

	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	595.274.590.283,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	595.274.590.283,00	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		Terlaksananya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	2.951.971.208,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Terlaksananya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	2.951.971.208,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pengelolaan BMD	100%	2.951.971.208,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pengelolaan BMD	100%	2.951.971.208,00	
	<b>J U M L A H</b>				<b>718.734.866.803,00</b>						

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa selain melaksanakan fungsinya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ( BUD ) yang mengelola Belanja PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan. Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbang desa diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbang kecamatan diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku satuan kerja perangkat daerah tidak menampung usulan dari masyarakat ke dalam program dan kegiatan tetapi selaku PPKD, BKAD menampung usulan masyarakat yang diakomodir ke dalam belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Desa atau masuk dalam belanja non program. Usulan masyarakat melalui musrenbang tersebut tidak masuk ke dalam rencana kerja (renja) BKAD selaku SKPD sehingga renja BKAD tidak menjelaskan mengenai usulan masyarakat tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, usulan usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui BKAD Kabupaten Deli Serdang sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang**

<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>					
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan Sumber Daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya mengenai aset daerah, dan saat ini masih terus dilakukan sinkronisasi aset dan pemeriksaan aset ke perangkat daerah agar diperoleh laporan aset yang akurat dan akuntabel sehingga akhirnya Kabupaten Deli Serdang bisa terus mempertahankan opini WTP dari hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam penganggaran Badan Pengelola Keuangan sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri yang diakses melalui [www.sipd.kemendagri.go.id](http://www.sipd.kemendagri.go.id) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional berikutnya tentang Transaksi Non Tunai/TNT. Transaksi Non Tunai / TNT adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain

dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, dan CMS atau sejenisnya.

Manfaat implementasi transaksi non tunai yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara, menekan laju inflasi, mencegah transaksi illegal (korupsi), meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of money), dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Kabupaten Deli Serdang memiliki visi “Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan”, sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD 2019-2024. Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik, sosial ekonomi, budaya, dan ekonomi.

Upaya mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan pula 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Kelima misi tersebut antara lain:

1. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif,

3. meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan,
4. meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban,
5. meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang turut mendukung visi dan misi Kabupaten. Badan Keuangan dan Aset Daerah secara langsung mendukung misi kelima yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, dengan indicator sasaran Opini BPK.

Untuk mewujudkan tercapainya misi dan prioritas pembangunan kabupaten deli serdang, sesuai dokumen Rencana Strategis Tahun 2019– 2024 BPKA, telah ditetapkan tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah “Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”.

Tujuan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun renja agar semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Renja BKAD searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah;



1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sebagai suatu alat strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program kerja BKAD Kabupaten Deli Serdang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BKAD Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, utamanya di bidang keuangan dan aset daerah, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang akan melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan, rumusan rencana program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut:

**Tabel 5**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten deli serdang		-	115.575.852.883,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	121.070.649.557,00
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Deli Serdang	100%	78.697.490,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	80.988.415,00
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Deli Serdang	100%	9.624.521.138,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	9.825.949.044,00
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Deli Serdang	100%	95.668.506,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	104.364.000,00
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi umum perangkat daerah	Deli Serdang	100%	2.392.535.295,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2.457.793.305,00
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Deli Serdang	100%	426.688.554,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	503.349.448,00
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Deli Serdang	100%	101.711.890.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	106.797.484.605,00
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Deli Serdang	100%	1.245.851.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1.300.720.740,00

5	02	02		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Terlaksananya program pengelolaan keuangan daerah		-	600.207.042.712,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	613.784.211.584,00
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Deli Serdang	100%	2.157.666.524,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2.237.914.141,00
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Deli Serdang	100%	1.206.699.884,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1.251.086.753,00
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Deli Serdang	100%	1.568.086.021,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1.615.128.602,00
5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Deli Serdang	100%	595.274.590.283,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	608.680.082.088,00
5	02	03		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Terlaksananya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	2.951.971.208,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	3.040.530.344,00
5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan BMD	Deli Serdang	100%	2.951.971.208,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	3.040.530.344,00
<b>J U M L A H</b>								<b>718.734.866.803,00</b>				

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. DELI SERDANG**  
**TAHUN 2024**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					718.734.866.803,00					737.895.391.485,00					
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					718.734.866.803,00								737.895.391.485,00		
	5	02				KEUANGAN					718.734.866.803,00								737.895.391.485,00		
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	74 Nilai			-	115.575.852.883,00						-	121.070.649.557,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	78.697.490,00			-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	80.988.415,00		
	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
						Jumlah Dokum					1 Dokumen	19.785.680,00	-	PENDAPATAN	-	4. Pemanta	-	1 Dokumen	20.379.250,00	BADAN KEUANG	

							en DPA- SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokum en DPA- SKPD						ASLI DAERAH (PAD)		pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi				AN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2. 01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokum en Peruba han DPA- SKPD dan Lapora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokum en Peruba han DPA- SKPD				1 Dokumen	19.785.680,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	1 Dokumen	20.379.250,00	BADAN KEUANG AN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2. 01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	39.126.130,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	1 Laporan	40.229.915,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	9.624.521.138,00			-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	9.825.949.044,00	
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima				60 Orang/bulan	7.298.998.820,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan	-	60 Orang/bulan	7.444.971.334,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Gaji dan Tunjangan ASN													Reformasi Birokrasi										
	5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					3 Dokumen	2.205.561.970,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	3 Dokumen	2.257.996.410,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																							
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	47.565.148,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	1 Dokumen	48.414.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan					1 Laporan	72.395.200,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	1 Laporan	74.566.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									



						n Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	95.668.506,00			-	4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	104.364.000,00	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	58.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	50 Paket	59.364.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undan				120 Orang	37.468.506,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	120 Orang	45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

							gan																		
	5	02	01	2.06		Administ rasi Umum Perangkat Daerah	-				-	2.392.535.295,00									4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	-	2.457.793.305,00	
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
						Jumlah Paket Kompo nen Instala si Listrik/ Penera ngan Bangun an Kantor yang Disedia kan				2 Paket	14.930.270,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	2 Paket	15.228.875,00	BADAN KEUANG AN DAN ASET DAERAH						
	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralat an dan Perlen gkapan Kantor yang Disedia kan				10 Paket	255.211.940,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	10 Paket	267.972.537,00	BADAN KEUANG AN DAN ASET DAERAH						

	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				36 Paket	83.655.045,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	36 Paket	85.328.145,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	28.211.720,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	4 Paket	31.032.892,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	38.611.680,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	2 Dokumen	39.770.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	47.234.544,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	12 Laporan	49.596.272,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	1.478.305.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	12 Laporan	1.507.871.814,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3500 Dokumen	385.405.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	3500 Dokumen	398.194.395,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	60.969.296,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	12 Dokumen	62.798.375,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	426.688.554,00			-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	503.349.448,00	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel														
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					11 Unit	322.236.850,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	11 Unit	395.763.956,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung					6 Unit	104.451.704,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	6 Unit	107.585.492,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
	5	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	101.711.890.100,00			-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	106.797.484.605,00	
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	7.168.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	24 Laporan	7.526.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				24 Laporan	101.134.825.848,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	24 Laporan	106.191.567.140,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	569.896.252,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	12 Laporan	598.391.065,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	1.245.851.800,00			-	4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	1.300.720.740,00		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar				18 Unit	648.118.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	18 Unit	680.524.740,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

							Pajak dan Perizinannya												
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	159.570.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	8 Unit	167.548.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir Rehabilitasi				2 Unit	371.153.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	2 Unit	382.287.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				65 Unit	67.010.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	65 Unit	70.360.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



						Bangun Lainny a yang Dipelih ara/Dir ehabilit asi																
2	5	02	02			PROGRA M PENGELO LAAN KEUANGA N DAERAH	-				-	600.207.042.712,00						-	613.784.211.584,00			
	5	02	02	2. 01		Koordinas i dan Penyusun an Rencana Anggaran Daerah	-				-	2.157.666.524,00				-	4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	-	2.237.914.141,00		
	5	02	02	2. 01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																
						Jumlah RKA- SKPD yang Diverifi kasi				54 Dokumen	45.955.800,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	54 Dokumen	47.334.474,00	BADAN KEUANG AN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2. 01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																
						Jumlah Peruba han RKA- SKPD yang Diverifi kasi				54 Dokumen	45.955.800,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	54 Dokumen	47.334.474,00	BADAN KEUANG AN DAN ASET DAERAH			

	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD													
						Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				54 Dokumen	46.705.800,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	54 Dokumen	48.106.974,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD													
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				54 Dokumen	47.005.800,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	54 Dokumen	48.415.974,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	775.881.000,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	2 Dokumen	814.675.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													

						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	814.442.000,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	2 Dokumen	838.875.260,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	129.664.000,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	1 Dokumen	133.553.920,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran				70 Orang	252.056.324,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	70 Orang	259.618.015,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	1.206.699.884,00			-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		-	1.251.086.753,00	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah															
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	500.016.700,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	12 Dokumen	515.017.201,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD															
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				648 Dokumen	310.703.600,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	648 Dokumen	326.238.780,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya															

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	159.146.320,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	12 Dokumen	163.920.710,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan					12 Dokumen	138.243.264,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	12 Dokumen	142.390.562,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank												
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah , Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran				12 Laporan	98.590.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	12 Laporan	103.519.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah , Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	1.568.086.021,00			-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	1.615.128.602,00	
	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				25 Laporan	226.969.496,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	25 Laporan	233.778.581,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah				2 Laporan	682.934.925,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	2 Laporan	703.422.973,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	



						Daerah yang Terkonsolidasi													
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	658.181.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	2 Dokumen	677.927.048,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

							ta													
	5	02	02	2.04		Penunjan g Urusan Kewenang an Pengelola an Keuangan Daerah	-				-	595.274.590.283,00			-	4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	-	608.680.082.088,00	
	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
						Jumlah Lapora n Hasil Analisis Perenc anaan dan Penyal uran Bantua n Keuang an				24 Laporan	474.788.599.000,00	-	DANA TRANSF ER UMUM- DANA BAGI HASIL, PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	24 Laporan	484.284.370.980,00	BADAN KEUANG AN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
						Jumlah Lapora n Hasil Pengel olaan Dana Darura t dan Mende sak				12 Laporan	50.000.000.000,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	12 Laporan	52.500.000.000,00	BADAN KEUANG AN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
						Jumlah Lapora n Hasil Pengel				12 Laporan	70.485.991.283,00	-	DANA TRANSF ER UMUM-	-	4. Pemanta pan Pelaksan	-	12 Laporan	71.895.711.108,00	BADAN KEUANG AN DAN ASET	

							olaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						DANA BAGI HASIL		aan Reformasi Birokrasi				DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-			-	2.951.971.208,00						-	3.040.530.344,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			-	2.951.971.208,00			-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	3.040.530.344,00	
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga													
						Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	838.739.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	1 Dokumen	863.901.788,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	153.401.592,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	1 Laporan	158.003.640,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.07		Pengamanan Barang Milik Daerah													



							n Barang Milik Daerah													
	5	02	03	2. 01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	905.060.840,00	-	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemanta pan Pelaksan aan Reformas i Birokrasi	-	1 Laporan	932.212.665,00	BADAN KEUANG AN DAN ASET DAERAH
											<b>J U M L A H</b>	<b>718.734.866.803,00</b>							<b>737.895.391.485,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dan renja tahun sebelumnya dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2024. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya untuk mewujudkan program kegiatan serta indikator yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi, baik secara internal maupun kepada pihak eksternal, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal serta memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara efisien, efektif dan akuntabel.

Lubuk Pakam, Mei 2023  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

BAGINDA THOMAS HARAHAHAP, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730721 199503 1 003